

## Analysis of Factors that Influence Public Policy

Muklis Siregar<sup>1</sup>, Sukiman<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Fakultas Ushluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
Email: [muklissiregar@yahoo.com](mailto:muklissiregar@yahoo.com)

### ABSTRAK

Kebijakan Publik adalah sejumlah atau beberapa aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ada dalam masyarakat, baik dalam bidang tertentu maupun di masyarakat umum. Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dalam tulisan ini, antara lain, Faktor Politik, Agama, Pendidikan dan ras.

**Keyword: Faktor; Kebijakan; Publik**

### ABSTRACT

*Public Policy is a number or several government activities carried out to solve a problem in society. Public policy is a rule made to bind our lives as a society, which regulates the rights and obligations of citizens in a country. Public policy can also be interpreted as a decision taken by the government to resolve certain problems that exist in society, both in certain fields and in the general public. In terms of terminology, the meaning of public policy has many meanings. It all depends on the angle one interprets it from. Public policy is an authority that the government has. This authority is exercised to carry out its duties and functions in relation to society. Not only with the community, but this authority is also exercised in relation to the business world. Basically, government policy in organizing people's lives in many aspects of life is a policy that is oriented towards the interests of the community itself. In every public policy, it will begin with the formulation of the problem. The factors that influence public policy in this article include political, religious, educational and racial factors.*

**Keyword: Factors; Policy; Public**

#### Corresponding Author:

Muklis Siregar,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia  
Email: [muklissiregar@yahoo.com](mailto:muklissiregar@yahoo.com)



## 1. INTRODUCTION

Banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Secara etimologi, kata kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yang artinya negara kota (polis), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi polita yang artinya negara. Selanjutnya dalam bahasa Inggris lama (Middle English) menjadi policie yang artinya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Pada mulanya istilah kebijakan dikaitkan dengan keputusan pemerintah (eksekutif), legislatif, dan atau keputusan bersama antara pemerintah eksekutif dan legislatif. Namun dalam perkembangannya, kebijakan (policy) lebih sering diartikan sebagai keputusan pemerintah (eksekutif) saja, oleh karena pemerintah (eksekutif) yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dapat mengarahkan masyarakat.

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut sebagai policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb.); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Istilah kebijakan kerap digunakan yang menyangkut dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmuss (1974) selanjutnya mendefinisikan kebijakan sebagai suatu prinsip- prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu

Secara umum menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) kebijakan dapat dibedakan kedalam tiga tingkatan:

- 1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif atau negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Dalam tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dari ketiga tingkatan kebijakan tersebut, menggambarkan proses pengambilan kebijakan secara hierarkis. Artinya kebijakan dalam tingkatan paling rendah tidak boleh bertentangan atau berbenturan dengan kebijakan dalam tingkatan paling tinggi, sehingga kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab atau mengatasi masalah publik (public problem).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi.

Sementara, pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem dari level bawah (RT dan RW) hingga hubungan dengan luar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik. Kadang adanya tekanan-tekanan dari Luar Pembuat keputusan atau kebijakan harus memenuhi tuntutan atau tekanan dari luar. Meskipun pembuat kebijakan melakukan pendekatan yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga, adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakannya.

Pemahaman di atas tampak memiliki konsistensi apabila dikaitkan dengan makna kebijakan itu sendiri. Sebab, kebijakan merupakan hasil dari serangkaian diskusi yang melibatkan kemauan politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh aktor-aktor politik tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah factor-faktor yang terlibat dalam sebuah proses pengambilan kebijakan. Ada empat aktor yang terlibat dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, yakni golongan/ ras, partai politik, pendidikan, agama.

## 2. RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode library research. Penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi kajian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan dengan review berbagai artikel jurnal, serta pustaka buku. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mana pada proses pengumpulan data dan pengumpulan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan. Dengan metode

library research, penulis melakukan review berbagai artikel jurnal serta pustaka buku sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait dengan kebijakan publik.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Publik:

##### 1) Peran Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.

Dalam perumusan kebijakan publik sudah pasti memiliki aktor yang merumuskan kewenangan yang ditetapkan. Para tokoh atau aktor ini memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara yang digunakan secara masing-masing. Pada awal perumusan kebijakan pasti membutuhkan proses secara keseluruhan. Fase ini menentukan berhasil atau tidak penyusunan kebijakan publik untuk diterapkan di era selanjutnya. Setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pengambilan keputusan, namun pengambilan kebijakan membentuk berbagai macam cara dan strategi terhadap berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan masing-masing.

Selama masih dalam proses siklus kebijakan, masalah, usulan, dan tuntutan yang diungkapkan menjadi urusan pemerintah dan menjadi program pemerintah. Kebijakan publik mempunyai tiga komponen yang saling mempunyai keterkaitan dalam proses yaitu pelaku kebijakan, isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Adapun pelaku atau aktor dalam kebijakan publik yakni pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program yang dikembangkan pemerintah dengan tujuan yang dimilikinya dan serta tahapan implementasi terhadap berbagai aktor yang terlibat. Aktor ini bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi legislatif lembaga peradilan kelompok-kelompok penekan dan organisasi komunitas.

##### i. Pelaku resmi

Pelaku resmi ini bisa meliputi instansi-instansi pemerintah seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagai lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk membentuk dan menyusun kebijakan. Lembaga legislatif ini mempunyai banyak suara yang awal kekuasaannya dari banyak pilihan dari publik yang memberikan suara. Tentu saja dalam perumusan kebijakan harus mengetahui keperluan dan tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, kebijakan publik harus disusun dan diciptakan tanpa memberatkan berbagai pihak.

Setelah kebijakan disusun oleh lembaga legislatif, maka tugas selanjutnya dari lembaga eksekutif ialah melaksanakan dan mengeksekusi kebijakan dengan mengimplementasikan kepada masyarakat atau pihak publik lainnya. Sedangkan lembaga yudikatif mempunyai wewenang untuk memberikannya masukan dan penilaian serta mengawasi dalam pertimbangan sanksi apabila mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam tahap implementasi pada sebuah kebijakan publik.

##### ii. Pelaku tidak resmi

Pelaku ini berasal dari luar lembaga resmi atau pihak swasta maupun organisasi massa, partai politik dan juga warga negara. Pelaku ini tidak memiliki wewenang dalam pembuatan maupun penyusunan kebijakan. Aktor ini memiliki peran untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan serta bisa memberikan masukan atau saran sesuai yang mereka inginkan. Tetapi apa yang warga sampaikan juga tidak memungkinkan bahwa saran yang diberikan akan diterima. Pelaku pembuat kebijakan sudah mempunyai target sendiri dalam mengelola tugas-tugasnya. Pelaksanaan dari kebijakan terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a) Spesifikasi rincian program
- b) Alokasi sumber daya
- c) Keputusan

Pelaksanaan kebijakan memberikan dampak pada keberhasilan kebijakan tersebut. Apabila suatu kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat maka suatu kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan maupun aktivitas untuk mewujudkan keputusan kebijakan agar mencapai tujuan.

Proses kebijakan terdapat beberapa proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan diimplementasikan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan

petinggi politik. Hasil dari sebuah kebijakan ialah kinerja kebijakan. Maka dari itu, sebuah kebijakan bersifat dinamis. Kebijakan dapat diciptakan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

Aktor kebijakan publik mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab serta mengelola kebijakan untuk mengimplementasikannya. Hasil dari penerapan atau implementasi dari kinerja aktor kebijakan publik memberikan pengaruh terhadap proses yang berbeda. Semua dari kebijakan publik mempunyai maksud untuk dapat mempengaruhi atau untuk mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang agar bertindak sesuai dengan peraturan atau tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam seperti hak paten dan hak duplikasi, membuka sebuah perumahan, tarif harga, pencurian malam hari atau penerimaan militer. Dalam hal ini jika kebijakan dapat dipenuhi, banyak orang tetap bertindak dengan cara yang diinginkan, jika mereka sudah menggunakan cara yang telah ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan sudah berjalan secara efektif atau secara ekstrem hasilnya dalam pelaksanaannya.

Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat, keberadaan kebijakan public sangat penting sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang sudah diatas kertas telah melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuatnya

## 2) Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik

Pada dasar dari kebijakan publik, kita harus memahami mengenai kebijakan publik dari berbagai sudut pandang maupun berasal dari beberapa agregasi yang ada. Dalam penyusunan kebijakan publik tentu harus memahami dan bisa menyusun kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat dan lebih efektif serta efisien.

Kebijakan publik bisa dilihat dari beberapa pandangan yang biasa kita ketahui. Dalam ekonomi, sosial, hukum, politik dan lainnya kita bisa memahami mengenai kebijakan publik yang lebih luas dan mengetahui konteksnya berdasarkan substansi masing-masing. Namun dilihat dari konteks substansi tersebut, politik dan administrasi negara memiliki konsep kebijakan publik yang lebih kompleks dan tertata serta memiliki dasar dari kebijakan seperti peraturan pemerintah/daerah, undang- undang maupun peraturan yang berasal dari pemerintahan.

Dalam implementasi kebijakan publik harus mengetahui dasar dan memahami prosesnya. Elemen penting yang ada pada sistem kebijakan publik bisa memberikan dampak yang positif dan mengoptimalkan baik dalam proses dan implementasiannya.

Dian Suluh Kusuma Dewi, dalam buku (Anggara, 2014) dijelaskan elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yaitu:

- a) Lingkungan kebijakan (policy environment), yaitu elemen yang berasal dari yang mendasari suatu konflik atau isu masyarakat yang mmeberikan efek pengaruh kepada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.
- b) Kebijakan publik (public policies) yaitu, keputusan penyusunan dari beberapa instansi yang saling bersangkutan dan disusun dengan maskud duntuk mencapai suatu tujuan tertentu

Pelaku kebijakan (policy stakeholders), yaitu proses dalam memengaruhi dan yang dipengaruhi baik secara individu maupun dalam kelompok ataupun organisasi.

## B. Faktor-Faktor Strategis Yang Dapat Mempengaruhi Kebijakan Publik

Faktor kondisi lingkungan yang dipandang bisa memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Faktor tersebut bisa berasal dari faktor sistem politik, atau partai politik, nilai- nilai sosial budaya, agama, Pendidikan, Ras, factor ekonomi, factor wilayah, dan factor IT (Informasi dan teknologi).

### 1) Faktor sistem politik/partai Politik

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti Negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul akan timbul aturan-aturan dan akhirnya adalah apa yang disebut dengan kekuasaan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan partai politik, adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Pada kehidupan politik modern yang demokratis, keberadaan Partai politik menjadi suatu keharusan. Partai politik berfungsi untuk memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, serta memberikan sarana suksesi

kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Partai politik dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Sebagai kelompok terorganisir, partai politik mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Target utama kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya.

Untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, memberikan jalan kompromi bagi pemikiran/ide yang saling bersaing secara damai dan legitimate, partai politik merupakan wadah komunikasi antara pemerintah dan rakyat, partai politik harus menjadi representation of idea. Partai politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu, sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Namun masih banyak ditemui pandangan kritis dan skeptis dari masyarakat terhadap partai politik, bahwa partai politik hanya sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan "birahi kekuasaan". Partai Politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang beruntung berhasil meraih suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilu untuk memaksakan kebijakan publik tertentu demi kepentingan kelompoknya.

#### **i. Kebijakan Publik sebagai produk Partai Politik**

Kebijakan publik dibuat untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama pemerintah yang diorientasikan pada penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Fakta yang berada dalam sistem perpolitikan di Indonesia bahwa adanya konsepsi catch- all party tentang pragmatisme dan rasionalitas yang bertumpu pada untung rugi telah menciptakan inkonsistensi tindakan partai dalam program-program dan kebijakan.

#### **ii. Peran Partai Politik Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Partai politik merupakan instrumen yang penting karena motif utama dari politik ialah untuk memperoleh kekuasaan yang terlegalisasi. Partai politik menjadi salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi, negara tanpa Partai politik belum bisa suatu negara disebut negara demokrasi. Partai politik membutuhkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih, demi menunjang kebijakan publik yang tepat, baik dengan cara merebutkan kekuasaan atau dengan melakukan intervensi kepada aktor pembuat kebijakan.

Merriam Budiardjo memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Sesuai dengan dukungan dari berbagai aktor kebijakan (policy aktor), baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah maupun bukan pemerintah. Dalam perumusan suatu kebijakan, diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, termasuk dukungan politik yang mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan undang-undang di Indonesia. Faktor politik juga mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang sesuai dengan pola hubungan antara pemerintah dan DPR RI, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks pembentukan undang-undang, faktor politik mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan undang-undang di Indonesia, serta keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang.

### **2) Faktor Agama**

Bahwa negara mengakui eksistensi lembaga-lembaga keagamaan dalam negara dan masyarakat. Hanya saja, terdapat perbedaan visi dan aspirasi di kalangan warga tentang sejauh mana keterlibatan agama itu dalam negara. Dalam konteks ini, orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk.

Pertama, agama sebagai ideologi, yang didukung oleh mereka yang ingin menjadikan agama sebagai ideologi negara, yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syari'ah dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga ia akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita mereka.

Kedua, agama sebagai sumber etika-moral (akhlak), yang didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan

etika-moral agama (religio-ethics), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal.

Di satu sisi orientasi ini membawa hal yang positif, karena dapat menghilangkan ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok-kelompok lain serta sangat kondusif bagi terwujudnya integrasi bangsa yang mejemuk ini. Namun di sisi lain, orientasi ini tidak cukup akomodatif terhadap aspirasi umat agama tertentu yang berupaya sedapat mungkin melaksanakan ajaran agama sepenuhnya.

Ketiga, agama sebagai sub-ideologi atau sebagai sumber ideologi jika kata “sub-ideologi” dianggap bisa menimbulkan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Orientasi pertama memang sangat idealistis dalam konteks Islam, tetapi kurang realistis dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas, yang ajarannya tidak hanya berupa etika-moral melainkan juga sejumlah norma-norma dasar.

Pelibatan agama dalam penguatan etika-moral (akhlak) bangsa, terutama ketika kondisi akhlak bangsa ini secara umum masih sangat lemah, seperti maraknya kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan, radikalisme, pemerkosaan, egoisme, keserakahan, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perkelaian antar kelompok, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Penguatan akhlak ini kini menjadi sangat penting untuk memperkuat etika politik dalam proses konsolidasi demokrasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 tetapi kurang berjalan dengan mulus, tidak seperti proses transisi demokrasi yang telah dilewati dengan sukses antara tahun 1998 sampai 2004.

Agama telah mempengaruhi proses dalam pembuatan kebijakan public di negara manapun dan mampu mengatur hubungan antar negara, tetapi apabila kurang kerja sama negara dengan agama sering menimbulkan komplik kepentingan, berbagai kebijakan dan pendekatan yang diterapkan negara dalam hubungannya dengan agama dan isu-isu keagamaan dianggap kurang efektif, bahkan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi.

### 3) Faktor Pendidikan

Pendidikan dipandang sebagai barang dan jasa publik yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah, mempengaruhi kebijakan publik terutama dalam upaya meratakan mutu Pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, oleh sebab ini setiap program-program dalam dunia pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, Adalah suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan manajemen (administrasi) pendidikan untuk memahami studi mengenai kebijakan publik (public policy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan manajemen pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas. Apabila ilmuwan manajemen pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (policy maker), akan tetapi lebih dari sekedar itu, ilmuwan manajemen pendidikan diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan.

Aspek pendidikan yang merupakan kajian manajemen pendidikan merupakan public goods bukan private goods. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan public goods, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik dalam dimensi kajian manajemen pendidikan yang multidisipliner.

Dalam kompleksitas kebijakan pendidikan, sungguh sulit mengaplikasikan bagaimana mengalokasikan sumberdaya politik (political resources) – status, legitimasi, kewenangan, kekuasaan, kepentingan – secara tepat. Dalam kasus lain, sesungguhnya sangat sulit untuk merumuskan realitas masalah sosial politik dalam ukuran kuantitatif. Demikian pula dengan sejumlah isu dan masalah politik problematik yang dihadapi akan cenderung disederhanakan untuk menyesuaikan diri pada keinginan analis dan metode kuantitatif yang dipakai, sehingga mengakibatkan hal mendasar menyangkut konteks realitas sosial politik yang bersifat keperilakuan dan dianggap tidak bisa dikuantitatifkan, dan cenderung diabaikan dan tidak dapat digambarkan secara penuh.

Perspektif kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan gagasan / pemikiran mengenai cara-cara (termasuk kebijakan

pendidikan). Pendekatan dalam analisis anlycentric lebih ditujukan pada dekomposisi masalah sosial makro strategis menjadi beberapa masalah yang lebih operasional.

Faktor pendidikan dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing di pasar kerja, dan memajukan kemajuan negara.

Faktor-faktor pendidikan yang mempengaruhi kebijakan publik meliputi:

- i. Aspek Pendidikan sebagai Public Goods: Pendidikan dipandang sebagai barang dan jasa publik, bukan barang pribadi, yang mempengaruhi perumusan kebijakan pendidikan dalam perspektif kebijakan publik.
- ii. Profesi Analis Kebijakan Pendidikan: Pengembangan profesi sebagai analis kebijakan pendidikan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan publik di bidang Pendidikan.
- iii. Kebijakan Publik vs. Kebijakan Privat: Perbedaan antara kebijakan publik (public policy) dan kebijakan privat (private policy) mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- iv. Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik: Implementasi kebijakan pendidikan mempengaruhi kebijakan publik dalam hal pengambilan keputusan, anggaran, regulasi, dan pengawasan.
- v. Kualitas dan Kuantitas Pendidikan: Kualitas dan kuantitas pendidikan memengaruhi kebijakan publik, terutama dalam upaya meratakan mutu pendidikan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan dengan mudah.

#### **4) Faktor Rasial**

Rasial dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam beberapa cara. Pertama, rasisme dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang diskriminatif terhadap suatu kelompok rasial tertentu. Misalnya, kebijakan yang mengarahkan pada perlindungan dan kesempatan yang lebih besar untuk suatu ras di atas ras lain dapat mempengaruhi kebijakan publik. Kedua, rasisme dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan. Misalnya, kebijakan yang tidak transparan dan tidak adil dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mengarahkan pada perlindungan dan kesempatan yang lebih besar untuk suatu ras di atas ras lain. Ketiga, rasisme dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Misalnya, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mengarahkan pada perlindungan dan kesempatan yang lebih besar untuk suatu ras di atas ras lain.

#### **5) Faktor Ekonomi/Finansial**

Faktor Ekonomi / Finansial dapat mempengaruhi kebijakan dengan mempertimbangkan implikasi keuangan dan biaya yang terkait dengan kebijakan, serta dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan tidak memiliki biaya yang tidak seimbang dengan manfaat yang diharapkan. Faktor ini perlu dipertimbangkan, terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam negara/daerah, seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya Otonomi Daerah kepada Kabupaten/Kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat/memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah, sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit, dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

#### **6) Faktor Informasi dan Teknologi**

Faktor informasi dan teknonogi tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat, dan faktor informasi dan teknonogi tidak memiliki implikasi langsung dalam proses perumusan kebijakan. Faktor informasi dan teknonogi lebih terkait dengan implementasi kebijakan, seperti dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam beberapa kasus, teknologi informasi dapat mempengaruhi kebijakan publik secara tidak langsung, seperti dengan mempengaruhi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat atau cara masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan. Tetapi, dalam konteks kebijakan publik, faktor informasi dan teknonogi tidak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan secara langsung

Tuntutan dan pemanfaatan atas kemajuan informasi dan teknonogi khususnya oleh pemerintah membawa manfaat dan konsekuensi yaitu:

- i. menurunkan biaya administrasi;
- ii. meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi;

- iii. dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen dan non departemen pada semua tingkatan;
- iv. wahana untuk menjalin interaksi, aspirasi, akomodasi dan sosialisasi sebagai salah satu strategi public relations (PR) atau kehumasan bagi pemerintah kepada publik.

Kemajuan teknologi juga sering kali dimotivasi oleh pasar dan peluang bisnis—juga memengaruhi kebijakan publik. Teknologi terus berubah dan hal ini mempengaruhi lingkungan bisnis secara langsung dan tidak langsung seiring dengan perubahan kebijakan publik seiring dengan penemuan teknologi. Teknologi baru, berbiaya lebih rendah, dan lebih mudah digunakan dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi serta mengurangi kerusakan lingkungan.

#### 7) Faktor Wilayah

Faktor wilayah juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam beberapa aspek. Pertama, wilayah dapat mempengaruhi kebijakan dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik setiap wilayah yang berbeda-beda. Misalnya, wilayah yang memiliki otonomi dan kualitas pelaksanaan keputusan kebijakan yang berbeda dapat memiliki implikasi yang berbeda dalam implementasi kebijakan. Kedua, wilayah dapat mempengaruhi kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan yang berkembang di wilayah tersebut. Dinamika kebijakan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang spesifik di wilayah tersebut. Ketiga, wilayah dapat mempengaruhi kebijakan dengan mempertimbangkan keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan keputusan kebijakan. Misalnya, pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat harus terlibat dalam pelaksanaan keputusan kebijakan pengembangan wilayah untuk mencapai kebersamaan, konsistensi, dan kesinambungan suatu program. Oleh karena itu, faktor wilayah mempengaruhi kebijakan publik dengan mempertimbangkan sifat wilayah, dinamika kebijakan, dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan keputusan kebijakan.

Dalam kebijakan pengembangan wilayah masih menunjukkan bahwa dinamika kebijakan public dalam konteks pengembangan wilayah belum memberikan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik dalam pengembangan wilayah yang antara lain mencakup membangun keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi masih memerlukan pelaksanaan nilai-nilai dasar pelayanan public yang lebih maksimal. Fokus kebijakan pengembangan wilayah masih memerlukan peningkatan yang lebih fokus sehingga kebijakan pengembangan wilayah sejalan dengan nilai-nilai dasar kebijakan public yang meliputi adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keterjangkauan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah.

#### 4. CONCLUSION

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek Partai Politik, dimana Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik berjalan harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Politik merupakan seni untuk memperoleh kekuasaan, namun cara- cara yang ditempuh acapkali menggunakan cara-cara yang tidak ideal dengan memainkan isu- isu yang membuat meresahkan masyarakat.

Kemudian pengaruh dan keterlibatan agama dalam proses pembentukan kebijakan publik yang tidak mungkin untuk dihindari karena agama telah menjadi bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan factor pendidikan merupakan public goods (barang dan jasa milik publik), dan merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar.

Faktor rasisme dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang diskriminatif terhadap suatu kelompok rasial tertentu. rasisme juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan. Serta rasisme dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara mengarahkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi kebijakan publik dengan mempertimbangkan implikasi keuangan dan biaya yang terkait dengan kebijakan, serta memastikan bahwa kebijakan tidak memiliki biaya yang tidak seimbang dengan manfaat yang diharapkan. Sedangkan faktor informatika dan teknologi di era

globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Dan factor kebijakan pengembangan wilayah masih menunjukkan kurangnya kualitas kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder yang memerlukan perlunya lebih focus dalam pelaksanaan tahapan kebijakan.

## REFERENCES

- Antara, Agama Pengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik, <https://jogja.antaranews.com/berita/305039/agama-pengaruhi-pembuatan-kebijakan-publik>, diakses tanggal 27 April 2024
- Budi Winarno, 2012, Kebijakan publik Teori proses dan Studi Kasus, Yogyakarta, CAPS
- Budiadjo Miriam, 1982, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Gramedia
- Davis, A., 2003 Everything You Should Know About Public Relations. Panduan Lengkap Tentang PR. Jakarta, Gramedia.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan Evaluasi, Yogyakarta, Samudra Biru
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 2007
- Kadir. Gau. Juli 2014 “Dinamika Partai Politik di Indonesia”. *Sosiohumaniora*. Volume 16 No. 2
- Metera, Igede Made. April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 10 No. 3
- Political Reform in Indonesia after Soeharto, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), h. 35; dan Edward Aspinal and Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratizations in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, (Singapore: ISEAS, 2010)
- Ridwan. Nopember 2021 “Kebijakan Zero Accident dan Keamanan Nasional: Harapan dan Tantangan”, *Jurnal Education and Development*, volume 9 No. 4
- Rusli, 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Kebijakan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing
- Sobirin Malian, 2021, *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*, Yogyakarta, Total Media
- Suharno. 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sutjipto, 1987, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar*, Padang, IKIP Padang,
- Tarno, Model Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan. [Sumbarprov. go. id, https://sumbarprov. go. id/home/news/1482-model-dan-faktor-yang-mempengaruhi-perumusan-kebijakan](https://sumbarprov.go.id/home/news/1482-model-dan-faktor-yang-mempengaruhi-perumusan-kebijakan), diakses tanggal 25 April 2024
- Uddin B. Sore dkk, 2017, *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media
- Sulaeman Affan, April 2015 “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah” *Cosmogov*, Volume I, No. 1
- Yeby Ma’asan, “Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Penggeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu”, *Juournal of Governance*, Vol 2, No. 2
- Yulyana, N. L. (2019). *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, [https://saylordotorg. github. io/text\\_the-sustainable-business-case-book/s07-01-factors-that-influence-public-. html](https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainable-business-case-book/s07-01-factors-that-influence-public-.html), diakses tanggal 25 April 2024